

ABSTRAK

(DUDUNG B SUPARDI, Nim : 986-11-0067, Analisis Pajak di Kabupaten Purwakarta ; Pembimbing drs. Dudi Sudradjat Abdurachim, MT)

Untuk mengetahui dinamika penerimaan uang daerah terutama penerimaan pajak dalam konteks otonomi di Kabupaten Purwakarta penulis melakukan penelitian dengan topik Analisis Elastisitas Pajak di Kabupaten Purwakarta dengan tujuan : 1) ingin mengetahui pola-pola sumber penerimaan pajak, 2) mengetahui respon penerimaan pajak dalam kaitannya dengan perkembangan kegiatan ekonomi di daerah, 3) Ingin mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak dari potensi yang ditargetkan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Regresi Linier Berganda, sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tingkat signifikannya di gunakan Uji t untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial, dan untuk mengetahui variabel bebas secara serempak dilakukan melalui Uji F

Dari hasil penelitian dan pengujian dapat diketahui bahwa :

1. Aktivitas ekonomi berpengaruh nyata terhadap besarnya penerimaan PAD baik melalui Uji t maupun Uji f. Hasil perhitungan dengan menggunakan koefisien determinasi di peroleh hasil 0,613 artinya bahwa aktivitas ekonomi menentukan penerimaan sebesar 61,3 % dan selebihnya disebabkan oleh faktor lainnya.
Adapun pengaruh aktivitas ekonomi terhadap penerimaan pajak relatif lebih kecil, diketahui dari hasil analisis sebesar 32,9 % dan sisanya sebesar 67,1 %, disebabkan oleh faktor lain.
2. Kapasitas penerimaan pajak saat ini di Kabupaten Purwakarta secara nyata dipengaruhi oleh penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, walaupun secara parsial kapasitas tahun sebelumnya tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan kapasitas pajak, demikian pula dengan pengujian secara serempak pengaruhnya relatif kurang
3. Usaha pajak yang terjadi di Kabupaten Purwakarta yang dianalisis selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang bervariasi hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain disebabkan oleh :
 - adanya perubahan kebijakan mengenai keuangan khususnya perpajakan.
 - adanya perubahan kondisi keuangan umum baik situasi krisis maupun fluktuasi inflasi.